
Penerapan Pengelolaan Persediaan Berdasarkan Sak Emkm Bagi Kelangsungan Usaha Mikro Di Kota Gorontalo

Rizaldy Saputra Ahmad¹, Hartati Tuli², Muliyani Mahmud³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia³

E-mail: rizaldysaputraahmad@gmail.com

Abstract: *The research aims to determine whether micro enterprises players in Gorontalo City, particularly in 9 subdistricts, apply inventory management based on Financial Accounting Standard for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) in their enterprises. The data collection technique employs questionnaire, whereas as the analysis, the research uses a descriptive one. The research finding reveals that the inventory management based on SAK EMKM has yet been applied fully by the micro enterprises, especially in several points. In the meantime, the application of inventory management based on SAK EMKM in micro enterprises in Gorontalo City has reached 40,30% or n the category of application in a small portion.*

Keywords: *SAK EMKM; Inventory; Mikro Enterprises*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pelaku usaha mikro yang ada di Kota Gorontalo yang tersebar pada 9 kecamatan apakah telah menerapkan pengelolaan persediaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) pada usaha mereka dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan persediaan berdasarkan SAK EMKM belum sepenuhnya dilakukan oleh usaha mikro. Masih terdapat beberapa pyang tidak diterapkan. Adapun penerapan SAK EMKM pada usaha mikro di Kota Gorontalo menunjukkan hasil dengan persentase penerapan oin sebesar 40,30% atau berada pada rentang kategori Sebagian Kecil Menerapkan.

Kata Kunci: **SAK EMKM; Persediaan; Usaha Mikro**

PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian bangsa karena memegang peranan penting dalam penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja serta menjadi penopang saat terjadinya guncangan krisis ekonomi di Indonesia (Ningtiyas:2017). Akan tetapi seiring dengan pentingnya peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia, ada saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan usahanya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman teknologi informasi, serta kendala penyusunan laporan keuangan (Muchid, 2012). Hal ini juga didukung oleh pendapat Zimmerer dan Scarborough dalam Maghfirah & BZ (2016) yang menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya, kurangnya pengalaman manajemen, dan kurang stabilnya keuangan akan mengakibatkan tingkat kematian bisnis mikro maupun kecil jauh lebih tinggi dibandingkan bisnis yang sudah lebih besar.

UMKM sebagai salah satu jenis usaha di Indonesia juga memiliki persediaan yang harus dijual dan dikelola dengan baik agar mendatangkan keuntungan. Sehingga pengelolaan persediaan pada UMKM juga harus diperhatikan. Sharma (2010) mengatakan bahwa pengelolaan persediaan sangat penting dalam pengelolaan operasional. Namun yang menjadi permasalahan bagi para pelaku UMKM adalah kurangnya pengetahuan tentang inventory management atau pengelolaan persediaan yang baik. Standar mengenai persediaan diatur dalam PSAK No 14 yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, selain itu persediaan juga diatur dalam SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) Bab 11 yang disahkan pada 19 Mei 2009. Setelah itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia menyadari bahwa keberadaan entitas mikro, kecil dan menengah di Indonesia adalah pondasi utama perekonomian, sehingga pengaturan dalam tatanan standar yang secara biaya tidak terlalu mahal dan secara

manfaat tepat guna diperlukan untuk membantu entitas tersebut berkembang dimulai dengan kesadaran mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan, sehingga diterbitkanlah SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) yang disahkan per 24 Oktober 2016 dan mulai efektif pada 1 Januari 2018.

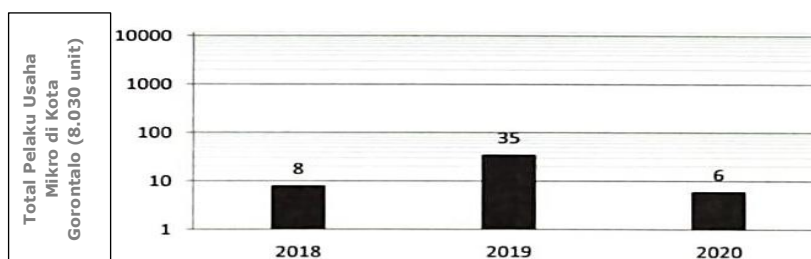
Di Indonesia, Covid 19 memasuki babak baru sejak pertama kali menyebar pada kasus pertama yang diumumkan pada awal Maret 2020. Penyusutan Omzet Pebisnis UMKM akibat covid 19 sangat signifikan sejak awal kemunculannya. Dampak pandemi covid 19 ini tentunya juga berimbas pada UMKM yang ada di Provinsi Gorontalo, sebuah Provinsi di daratan Sulawesi Utara yang menjadi Provinsi terakhir dalam melaporkan kasus pertama infeksi covid 19 di tahun 2020. Jumlah UMKM di Provinsi Gorontalo ini meningkat dari tahun ke tahun. Tentu krisis pandemi covid 19 ini juga memporakporandakan eksistensi UMKM di Provinsi Gorontalo (Ismail, 2021). UMKM melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Salah satu faktor keberhasilan dalam kelangsungan usaha adalah pengelolaan persediaan yang efektif dan efisien. Sebaliknya jika entitas tidak melakukan pengelolaan persediaan dengan baik, maka entitas dapat memperoleh kerugian yang cukup signifikan (material). Pengambilan keputusan yang baik tentang persediaan akan mempertahankan kelangsungan usaha dan mendorong masyarakat sebagai pelanggan agar tidak meninggalkan produk yang dipasarkan (Wafi, 2019).

Persediaan harus dimiliki karena merupakan produk perusahaan yang harus dijual sebagai sumber pendapatan. Persediaan merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Karena itu persediaan harus dikelola dengan baik agar perusahaan dapat menjual produknya serta memperoleh pendapatan sehingga tujuan perusahaan tercapai (Rudianto, 2012:222).

Mangopa et al., (2020) menemukan bahwa pengelolaan persediaan menurut standar yang berlaku yaitu SAK EMKM belum sepenuhnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil. Masih terdapat beberapa poin yang tidak diterapkan. Adapun perbandingan penerapan SAK EMKM pada usaha mikro & kecil menunjukkan hasil bahwa usaha kecil lebih unggul jika dibandingkan dengan usaha mikro dengan persentase penerapan sebesar 60,67% atau berada pada rentang kategori Cukup Menerapkan sementara untuk usaha mikro hanya sebesar 40,76% atau Sebagian Kecil Menerapkan. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan para pelaku usaha mikro dalam mengelola persediaannya perlu dilakukan.

Persediaan merupakan aktiva perusahaan yang memegang peranan penting dalam jalannya sebuah usaha. Persediaan menjadi fokus utama dalam sebuah transaksi perdagangan. Tanpa persediaan maka transaksi perdagangan tidak akan pernah terjadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Barchelino (2016) yang mengatakan bahwa semua aktivitas operasional perusahaan memprioritaskan pada usaha untuk melikuidasi persediaan menjadi kas. Persediaan merupakan bagian dari aktiva lancar yang paling besar kontribusinya terhadap kelangsungan usaha sebuah perusahaan baik usaha yang memiliki skala besar, menengah atau bahkan perusahaan kecil.



Gambar 1. Grafik Jumlah Pelaku UMKM Yang Menerapkan Pengelolaan Persediaan Berdasarkan SAK EMKM tahun 2018-2020 (Sumber data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo 2021)

Grafik di atas menunjukkan bahwa di Kota Gorontalo dari tahun 2018-2020 jumlah pelaku Usaha Mikro yang menerapkan pengelolaan persediaan sesuai dengan SAK EMKM masih sangat kurang bahkan grafiknya cenderung berfluktuasi.

Berdasarkan data pelaku UMKM dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo jumlah pelaku usaha Mikro lebih banyak dari usaha kecil dan menengah. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan peningkatan per tahunnya. Tahun 2020 pelaku usaha mikro sebanyak 8.030 dari 11.460 UMKM di Kota Gorontalo (Pratama Musue, 2021). Ini menjadi salah satu alasan penelitian ini berfokus pada usaha mikro.

Beberapa jenis UMKM sangat bergantung pada pengelolaan persediaan yang baik. Pelaku usaha dagang yang menyediakan barang kebutuhan dapat menjaga agar persediaan tetap variatif (banyak pilihan), tidak ada kerusakan, dan tidak kadaluarsa yang dapat merugikan konsumen. Atau usaha jasa yang dapat selalu yakin bahwa persediaan di tempat penyimpanan (gudang) masih menyediakan barang-barang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada klien. Intinya, memiliki pengelolaan persediaan yang baik sangat diperlukan agar aktivitas bisnis tidak terganggu dan agar konsumen dapat terlayani dengan baik.

Hal ini juga didukung oleh penelitian Tuli (2019) yang menjelaskan bahwa para pelaku usaha khususnya usaha mikro belum mengenal dan mengetahui adanya standar yang menjadi acuan dalam menjalankan usahanya yaitu SAK EMKM. Para pelaku usaha mikro cenderung masih banyak yang belum menambahkan berbagai komponen biaya yang timbul pada saat terjadi transaksi pembelian persediaan pada harga pokok produk yang mereka jual, sehingga menyebabkan perolehan pendapatan yang sedikit bahkan cenderung mengalami kerugian.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah, banyak pelaku usaha yang masih salah dalam mengelola dan menentukan metode pencatatan serta pengakuan persediaan utamanya adalah para pelaku usaha mikro yang memang memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi persediaan yang diatur dalam SAK EMKM.

Dalam SAK EMKM Bab 9 diatur dan dijelaskan mengenai berbagai hal tentang persediaan, diantaranya adalah pengakuan dan pengukuran biaya persediaan yang menjadi dasar penentuan harga pokok. Akan tetapi banyak yang belum tahu dan belum menerapkan SAK EMKM tersebut dalam usahanya dikarenakan ketidaktahuan dan kurangnya informasi. Banyak pelaku usaha mikro yang peneliti temui belum memahami pengelolaan persediaan yang baik, sehingga banyak pelaku usaha tersebut yang harus menderita kerugian akibat timbulnya biaya persediaan yang tidak terjual karena habis masa layak pakainya.

Karena penelitian ini merupakan penelitian kolaboratif dan lanjutan penelitian sebelumnya oleh Mangopa: 2020, maka yang membedakan penelitian ini adalah mencakup secara keseluruhan pelaku usaha mikro yang ada di Kota Gorontalo yang terdiri dari 9 Kecamatan yang masing-masing terdapat sampel sebagai sasaran dalam penelitian ini yang berasal dari semua bidang baik bidang kuliner, fashion, pendidikan, otomotif, agribisnis dan teknologi internet.

Oleh karena itu, penelitian penerapan pengelolaan persediaan berdasarkan SAK EMKM bagi kelangsungan usaha mikro di Kota Gorontalo ini sangat penting untuk dilakukan sebagai salah satu upaya strategi pemberdayaan masyarakat khususnya para pelaku ekonomi mikro demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Edukasi mengenai pengelolaan persediaan ini sangat diperlukan oleh para pelaku usaha dalam mewujudkan prinsip 'going concern' pada usahanya.

KAJIAN LITERATUR

Teori Atribusi

Teori atribusi juga adalah sebuah teori yang mempelajari tentang bagaimana seorang individu menginterpretasikan suatu peristiwa, serta mempelajari bagaimana menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Fritz Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi mengungkapkan bahwa teori ini menjelaskan tentang perilaku seseorang mengenai bagaimana menentukan motif dan maksud tentang perilakunya serta penyebabnya.

Menurutnya, teori ini mengacu tentang bagaimana menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah internal misalnya sifat, kepribadian dan karakter ataupun eksternal misalnya situasi atau suatu keadaan tertentu yang memaksanya untuk melakukan perbuatan tertentu (Munawaroh, 2019)

Menurut Muhamad et al., (2019) Teori atribusi adalah teori yang menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, kemudian mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dibawah kendali perilaku individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan berperilaku karena terpaksa dari situasi atau lingkungan.

Kelangsungan Usaha

Kelangsungan diartikan sebagai suatu bentuk kata kerja yang menerangkan suatu keadaan atau kondisi yang sedang berlangsung terus menerus dan berlanjut, merupakan suatu proses yang terjadi dan nantinya bermuara pada suatu eksistensi atau ketahanan suatu keadaan (disarikan dari kamus Lengkap Bahasa Indonesia).

Pernyataan-pernyataan ini dapat dianalogkan dan dipakai sebagai definisi konsep dalam penelitian ini. Bahwa keberlangsungan usaha merupakan suatu keadaan atau kondisi usaha, dimana di dalamnya terdapat cara-cara untuk mempertahankan, mengembangkan dan melindungi sumber daya serta memenuhi kebutuhan yang ada didalam suatu usaha (industri). Cara-cara yang dipergunakan ini bersumber dari pengalaman sendiri, orang lain, serta berlandaskan pada kondisi ekonomi yang sedang terjadi didalam dunia usaha.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, keberlangsungan berarti kelanjutan, ketahanan. Pengertian keberlangsungan menurut kamus ilmu-ilmu sosial yaitu cara dimana suatu tindakan atau tugas dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan keberlangsungan usaha adalah suatu kondisi sebuah usaha yang masih tetap berjalan atau sedang berlangsung terus menerus dari sejak didirikan sampai sekarang hingga waktu yang tidak ditentukan dan dapat mempertahankan berjalannya usaha dengan produk yang dihasilkan.

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.

2. Usaha kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini. Kriteria usaha kecil sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha

kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.

Jadi yang dimaksud dengan UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh orang/badan dengan kekayaan bersih Rp 0 – Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan hingga Rp 50.000.000.000. Adapun kriteria UMKM yang diatur dalam UU No 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria UMKM menurut UU No 20 tahun 2008

	USAHA	KRITERIA	
		ASSET	OMSET
	MIKRO	Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau	Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
	KECIL	Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;	Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
	MENENGAH	Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Sumber: UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Penelitian ini lebih berfokus pada usaha mikro di Kota Gorontalo, karena setelah ditelusuri usaha mikro di Kota Gorontalo lebih banyak berkembang dan berjalan.

Persediaan

Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau di proses lebih lanjut (Rudianto, 2012:222). Sedangkan menurut Baridwan (2015:149) persediaan barang adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) Bab 9 mendefinisikan persediaan adalah aset:

- a. Untuk dijual dalam kegiatan normal
- b. Dalam proses produksi untuk kemudian dijual; atau
- c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa

Persediaan barang dagang diartikan sebagai barang yang diperoleh perusahaan untuk dijual kembali atau diolah lebih lanjut dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan (Indroprasto & Suryani, 2012). Sementara Kieso et al, (2008:402) menjelaskan bahwa persediaan (inventory) adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Alexandri (2009) dalam (Lahu, 2017) menjelaskan bahwa persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi

barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam proses produksi.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan aktiva perusahaan yang tersedia untuk dijual atau di olah terlebih dahulu dalam kegiatan operasional perusahaan dengan tujuan memperoleh pendapatan.

Jenis-Jenis Persediaan

Perusahaan dagang yang aktivitasnya adalah membeli dan menjual barang jadi, memiliki persediaan dalam bentuk barang jadi atau barang dagang. Sedangkan perusahaan manufaktur yang harus memroses bahan baku hingga menjadi barang jadi, memiliki tiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi (Rudianto, 2012:222). Perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur selalu memiliki persediaan di toko maupun di gudang perusahaan. Persediaan tersebut dapat berupa persediaan bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi. Heizer dan Render (2010) dalam (Lahu, 2017) menyatakan bahwa ada 4 jenis persediaan yaitu:

1. Persediaan bahan mentah (raw material inventory) adalah bahan-bahan yang telah dibeli tetapi belum diproses. Bahan-bahan dapat diperoleh dari sumber alam atau dibeli dari supplier (penghasil bahan baku).
2. Persediaan barang setengah jadi (work in process) atau barang dalam proses adalah komponen atau bahan mentah yang telah melewati sebuah proses produksi/ telah melewati beberapa proses perubahan, tetapi belum selesai atau akan diproses kembali menjadi barang jadi.
3. Persediaan pasokan pemeliharaan/perbaikan/operasi (maintenance, repair, operating) yaitu persediaan-persediaan yang disediakan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan operasional yaitu persediaan-persediaan yang disediakan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan operasional yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin-mesin dan proses-proses tetap produktif.
4. Persediaan barang jadi (finished good inventory) yaitu produk yang telah selesai di produksi atau diolah dan siap dijual.

Sedangkan menurut Keown (2010) dalam Budianto & Ferriswara (2017) terdapat beberapa tipe umum persediaan berdasarkan proses produksi sebagai berikut:

- a. Persediaan Bahan Mentah (Raw Materials); terdiri dari bahan dasar yang dibeli dari perusahaan lain untuk digunakan dalam operasi produksi perusahaan.
- b. Persediaan Barang Setengah Jadi (Work-in Process); mencakup barang setengah jadi yang membutuhkan kerja tambahan atau proses lanjutan sebelum menjadi barang jadi
- c. Persediaan Barang Jadi (Finished Goods); mencakup barang yang telah selesai proses produksinya tetapi belum dijual oleh perusahaan, dan masih berada di dalam gudang.

Fungsi-fungsi Persediaan

Menurut Heizer & Render (2010) dalam Supit & Jan (2015) persediaan dapat melayani beberapa fungsi yang menambah fleksibilitas bagi operasi perusahaan. Adapun beberapa fungsi persediaan adalah sebagai berikut:

1. Decouple atau memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Sebagai contoh jika persediaan sebuah perusahaan berfluktuasi, persediaan tambahan mungkin diperlukan untuk melakukan decouple proses produksi dari pemasok.
2. Melakukan decouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan seperti ini digunakan secara umum pada bisnis eceran.
3. Mengambil keuntungan dari diskon kuantitas karena pembelian dalam jumlah besar dapat mengurangi biaya pengiriman barang.
4. Melindungi terhadap inflasi dan kenaikan harga.

Metode Pencatatan Persediaan

Ada dua metode yang digunakan dalam pencatatan persediaan, yaitu metode periodik atau fisik dan metode perpetual. Metode pencatatan persediaan menurut Darwati, Slamet & Maimunah (2015) antara lain yaitu:

1. Metode Fisik

Dalam sistem ini perusahaan tidak menyediakan kartu-kartu untuk mencatat persediaan barang dagangan. Untuk mengetahui nilai persediaan barang dagangan pada suatu saat tertentu diperlukan perhitungan fisik persediaan. Sementara menurut Erhans (2010) dalam Budianto & Ferriswara, (2017) dalam periode pencatatan periodik, harga atas barang dagangan yang dijual (HPP) dihitung dengan cara : persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Jika dalam pembelian barang dagangan terdapat potongan pembelian, retur pembelian dan biaya angkut barang, maka harus dihitung terlebih dahulu biaya pembelian. Biaya pembelian dihitung dengan cara : pembelian dikurangi potongan pembelian dan retur pembelian ditambah dengan biaya-biaya masuk.

2. Metode Perpetual

Dengan sistem komputerisasi persediaan saat ini memungkinkan penyelenggaraan akuntansi untuk semua jenis persediaan dengan metode perpetual. Dengan sistem inframerah, computer dapat mengidentifikasi tiap item persediaan dengan cepat melalui kode-kode bar yang sudah tercetak di produk.

Karakter pencatatan dengan sistem perpetual sebagai berikut:

1. Pembelian barang dagangan untuk dijual akan dicatat dalam rekening persediaan barang dagangan bukan rekening pembelian
2. Biaya angkut pembelian, retur, dan pengurangan harga pembelian, serta potongan tunai pembelian dicatat dalam rekening persediaan, bukan dalam rekening terpisah (rekening tersendiri retur dan pengurangan harga pembelian).
3. Harga pokok penjualan diakui pada saat penjualan dengan mendebit rekening harga pokok penjualan dan mengkredit rekening persediaan barang dagangan.
4. Persediaan merupakan rekening pengendali yang didukung oleh buku besar pembantu. Buku pembantu berisi catatan persediaan secara individual (tiap-tiap jenis barang dibuatkan suatu buku pembantu). Dalam buku pembantu ini memperlihatkan tentang kualitas dan harga tiap-tiap persediaan.

Karena metode perpetual mengharuskan perusahaan memiliki kartu stok, maka setiap arus keluar barang dapat diketahui beban pokoknya. Jadi, dalam membuat jurnal transaksi penjualan, metode perpetual mengharuskan akuntan mencatat beban pokok penjualannya dari setiap transaksi penjualan yang dilakukan. Dengan demikian, dari setiap jurnal transaksi penjualan, dapat diketahui laba kotor yang diperoleh perusahaan. Metode ini, jika diterapkan secara murni, lebih cocok digunakan dalam perusahaan yang frekuensi transaksinya tidak terlalu tinggi, tetapi nilai per unit transaksinya tinggi (Rudianto, 2012:224).

Metode Penilaian Persediaan

Metode penilaian persediaan menurut Pontoh (2013) dalam Budianto & Ferriswara (2017) mengalokasikan total biaya persediaan yang tersedia dan yang dijual. Metode ini terdiri dari empat metode paling umum yaitu:

a. Identifikasi Khusus

Metode ini memiliki keunggulan dalam menentukan secara tepat biaya persediaan per unit yang terjual, dan menentukan secara tepat nilai persediaan akhir yang tersisa dalam gudang. Hal ini disebabkan karena unit persediaan yang akan dijual dapat diidentifikasi terpisah secara tepat. Akan tetapi, metode ini menjadi tidak praktis ketika diterapkan dalam organisasi bisnis yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar dan eceran.

b. Metode Biaya Rata-rata

Metode ini mengasumsikan bahwa harga beli sebuah persediaan yang dibeli terakhir akan menjadi beban pokok penjualan terlebih dahulu, pada saat terjadinya transaksi penjualan. Nilai persediaan yang akan dilaporkan adalah berdasarkan harga beli persediaan pada awal persediaan. Menurut Reeve et al., (2012:351) dalam metode ini, barang yang dikeluarkan/dijual maupun barang yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata bergerak. Jadi, barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang memiliki nilai rata-rata. Saat metode biaya rata-rata digunakan dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit rata-rata untuk setiap jenis barang dihitung setiap kali terjadi pembelian. Kemudian, biaya unit ini digunakan untuk menghitung biaya setiap penjualan sampai pembelian lain dilakukan dan biaya rata-rata yang baru dihitung

c. Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO)

Metode ini berasumsi bahwa barang yang pertama kali dibeli merupakan barang yang pertama kali dijual, dan barang yang terakhir kali dibeli merupakan barang yang tersisa sebagai persediaan. Menurut metode ini, harga pokok penjualan dan persediaan akhir dihitung seolah-olah barang tersebut keluar masuk. Saat metode FIFO digunakan selama periode inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum, biaya unit yang lebih awal akan lebih rendah dibandingkan dengan biaya unit paling terakhir. Oleh karena itu metode FIFO akan menghasilkan laba kotor tertinggi. Akan tetapi, persediaan perlu diganti dengan harga yang lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh harga pokok penjualan.

d. Metode Masuk Terakhir Keluar Pertama (LIFO)

Dalam metode ini, barang yang masuk (dibeli/diproduksi) paling akhir akan dikeluarkan/dijual paling awal, sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi awal periode (Rudianto, 2012:224). Sementara Reeve et al (2012:350) menyatakan bahwa saat metode LIFO digunakan dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit yang terjual merupakan biaya dari pembelian terakhir.

Pengelolaan Persediaan

Persediaan merupakan aktiva perusahaan yang harus dikelola dengan baik agar mendatangkan keuntungan. Baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar harus pandai dalam mengelola persediaannya agar mendatangkan laba. Kesalahan dalam pengelolaan persediaan akan menyebabkan kerugian bagi sebuah usaha bahkan akan menyebabkan matinya sebuah usaha (Mangopa et al., 2020).

Kesalahan apapun dalam persediaan akan mempengaruhi, baik neraca maupun laporan laba rugi. Sebagai contoh, kesalahan dalam penghitungan fisik persediaan akan menyebabkan salah saji untuk persediaan akhir, aset lancar, jumlah aset dalam neraca. Sebagai tambahan, kesalahan dalam persediaan juga akan memengaruhi harga pokok penjualan dan laba kotor dalam laporan laba rugi (Reeve et al., 2012).

Banyak pelaku usaha yang masih salah dalam mengelola dan menentukan metode pencatatan serta pengakuan persediaan utamanya adalah para pelaku usaha mikro yang memang memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi persediaan yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah. Hal ini juga di dukung dengan pendapat Maghfirah & BZ (2016) yang menjelaskan bahwa penyebab tingginya tingkat kematian bisnis mikro daripada bisnis yang sudah lebih besar adalah kurangnya sumber daya, pengalaman manajemen dan kurang stabilnya keuangan. Selain itu masalah yang paling umum dihadapi oleh pelaku usaha mikro adalah kesalahan dalam penetapan harga jual yang tidak tepat. Kesalahan ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai perhitungan dan penetapan harga pokok produksi. Sehingga harga pokok yang menjadi dasar untuk penentuan harga jual salah dan menyebabkan permasalahan keuangan.

1. Ruang Lingkup Persediaan

Meliputi barang yang dibeli untuk disimpan dan dijual kembali, atau pengadaan tanah dan propertilainnya untuk dijual kembali (Warren, reeve, Fess 2005:440).

2. Pengakuan & Pengukuran persediaan yang meliputi metode dan biaya perolehan persediaan (SAK 2017):
 - a. Biaya pembelian meliputi harga beli, bea import, pajak lainnya kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung serta dikurangkan dengan diskon dagang, rabat, dan hal serupa lain.
 - b. Biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Biaya Lain-lain meliputi biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya:
 1. Jumlah pemborosan yang tidak normal
 2. Biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi selanjutnya.
 3. Biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan kontribusi untuk membuat persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.
 4. Biaya Penjualan
3. Penyajian Persediaan

Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut.

METODE PENELITIAN

Model atau desain penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif (Nazir, 2014:43).

Demikian juga Sugiyono (2019) menyatakan bahwa metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha mikro di Kota Gorontalo yang berjumlah 8.030 unit usaha mikro yang ada di 9 Kecamatan Kota Gorontalo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan Non Probability Sampling dengan menggunakan teknik Insidental Sampling. Peneliti menentukan sampel penelitian ini berjumlah 99 yang terbagi atas 9 kecamatan berdasarkan teknik perhitungan random sampling secara insidental oleh peneliti untuk mendapatkan perbandingan yang seimbang.

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2018:102). Setiap instrumen memiliki skala pengukuran. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah skala interval. Skala interval dalam penelitian ini menggunakan skala lima poin yang dijabarkan sebagai berikut (Sekaran, 2006:18):

Tabel 2. Instrumen Skala Interval 5 poin

No	Item Kuesioner	Skor
1	Menerapkan Sepenuhnya	5
2	Sebagian Besar Menerapkan	4
3	Cukup Menerapkan	3
4	Sebagian Kecil Menerapkan	2
5	Tidak Menerapkan Sama Sekali	1

HASIL

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Dari hasil uji validitas dapat dilihat bahwa semua butir pernyataan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sementara dari hasil uji Cronbach Alpha, nilai yang didapatkan adalah 0,770 atau sekitar 77%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dalam instrumen/kuesioner yang digunakan valid dan reliabel.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Tentang Persediaan

Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah tentang persediaan, dilakukan penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala interval. Pernyataan untuk penerapan SAK EMKM terdiri dari 3 Indikator yaitu Ruang Lingkup, Pengakuan & Pengukuran, dan Penyajian yang tersebar dalam 14 butir pernyataan. Adapun hasil pengolahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Perhitungan Penerapan Pengelolaan Persediaan Berdasarkan SAK EMKM pada Usaha Mikro di Kota Gorontalo

Pernyataan	Persentase	Kriteria
Pernyataan 1 : Persediaan adalah barang yang dibeli untuk dijual kembali	90,5%	Menerapkan Sepenuhnya
Pernyataan 2 : Persediaan (barang) yang dibeli pertama kali adalah yang pertama kali dijual	69 %	Sebagian Besar Menerapkan
Pernyataan 3 : Persediaan yang tersedia di toko diakui sebesar jumlah semua biaya yang dikeluarkan saat membeli persediaan	28,6 %	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 4 : Saat membeli barang, biaya angkut pembelian (bayar bentor, ojek dsb) dihitung sebagai penambah harga pokok produk (harga yang diperoleh dari penjumlahan semua biaya yang timbul sampai barang tsb siap dijual.	35,7 %	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 5 : Diskon/Potongan harga yang didapatkan ketika membeli barang untuk dijual mengurangi harga pokok produk	19 %	Tidak Menerapkan Sama Sekali
Pernyataan 6 : Biaya tenaga kerja langsung (pekerja) ditambahkan pada harga pokok produk	31 %	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 7 : Biaya tenaga kerja langsung (pekerja) ditambahkan pada harga jual produk (harga pokok + keuntungan yang diinginkan)	28,6 %	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 8 : Biaya Listrik dianggap sebagai penambah harga pokok produk.	31 %	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 9 : Biaya Listrik dianggap sebagai penambah harga jual produk (harga pokok + keuntungan yang diinginkan)	31%	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 10 : Jika timbul biaya yang tak terduga dalam proses pembelian barang untuk persediaan. Biaya tersebut ditambahkan ke dalam harga pokok produk yang dijual.	21,4 %	Sebagian Kecil Menerapkan

Pernyataan 11 : Jika timbul biaya yang tak terduga dalam proses pembelian barang untuk persediaan. Biaya tersebut ditambahkan ke dalam harga jual produk (harga pokok + keuntungan yang diinginkan)	19 %	Tidak Menerapkan Sama Sekali
Pernyataan 12 : Persediaan harus di catat/disajikan di dalam laporan posisi keuangan pada bagian aset/harta	26,2 %	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 13 : Jika terdapat persediaan yang kadaluarsa maka produk tersebut harus dibuang	69 %	Sebagian Besar Menerapkan
Pernyataan 14 : Produk yang kadaluarsa membuat penghasilan sedikit karena harus dibuang	64,3 %	Sebagian Besar Menerapkan
Rata-Rata	40,3%	Sebagian Kecil Menerapkan

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator yang paling diterapkan oleh pelaku usaha mikro adalah indikator pertama pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil & Menengah (SAK EMKM) yaitu ruang lingkup yang berisi definisi dari persediaan. Definisi persediaan menurut SAK EMKM adalah aset yang tersedia untuk dijual, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dalam hal ini, persediaan barang dagangan yang dimiliki oleh usaha mikro di Kota Gorontalo adalah barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali tanpa mengalami proses pengolahan barang. Sehingga perlakuan barang dagangan pada jenis usaha ini sejalan dengan penelitian Barchelino (2016) yaitu dibeli, disimpan dan dijual.

Selanjutnya indikator kedua yaitu pengakuan dan pengukuran. Berdasarkan hasil penelitian, indikator ini memiliki tingkat penerapan yang rendah pada usaha mikro. Hal ini sejalan dengan pendapat Maghfirah & BZ (2016) yang menganggap bahwa semakin besar skala sebuah usaha maka pengelolaan usahanya akan lebih baik karena memiliki pemahaman serta sumber daya manusia yang lebih baik daripada usaha yang berskala kecil.

Indikator terakhir adalah penyajian yang dilihat dari dua poin. Poin pertama adalah penyajian akun persediaan pada laporan posisi keuangan. Dalam hal ini usaha mikro sebagian kecil menerapkan pencatatan persediaan dalam laporan posisi keuangan pada bagian aset. Hal ini sejalan dengan penelitian Aminatul (2019), Barus, et.,al (2018), Putra (2018), Judianto, et.,al (2018), Ismadewi, et.,al (2017) yang mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi oleh kebanyakan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kurangnya pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar, serta sumber daya manusia (SDM) yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Poin kedua yaitu mengenai beban persediaan yaitu sisa persediaan harus diakui sebagai beban di periode pendapatan yang terkait. Poin ini cenderung lebih diterapkan oleh pelaku usaha mikro, karena kebanyakan pelaku usaha mikro membeli persediaan dari toko yang tidak melayani retur barang rusak atau kadaluarsa. Sehingga sisa barang yang kadaluarsa harus dibuang dan mempengaruhi pendapatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para pelaku usaha mikro di Kota Gorontalo belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Persediaan pada pengelolaan persediaan mereka. Indikator yang paling diterapkan oleh pelaku usaha mikro hanya indikator pertama yaitu ruang

lingkup, sementara indikator yang paling tidak diterapkan adalah indikator ketiga yaitu penyajian persediaan pada laporan posisi keuangan bagian aset. Jika di lihat penerapan SAK EMKM tentang pengelolaan persediaan pada usaha mikro, maka usaha mikro masih berada pada kategori sebagian kecil menerapkan.

SARAN

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku Usaha Mikro di Kota Gorontalo agar selalu memperhatikan pengelolaan persediaannya karena persediaan memegang peranan penting dalam keberlangsungan jenis usaha seperti ini.
2. Penerapan pengelolaan persediaan berdasarkan SAK EMKM bagi kelangsungan usaha mikro di Kota Gorontalo sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan keuntungan dan menjaga kestabilan usaha, sehingga para pelaku usaha mikro harus menerapkan standar tersebut.
3. Pentingnya bagi pemerintah baik daerah maupun pusat untuk lebih memperhatikan eksistensi dari usaha mikro dengan melakukan berbagai pelatihan tentang pengelolaan usaha khususnya tentang pengelolaan persediaan demi keberlangsungan jenis usaha yang menjadi salah satu penggerak perekonomian Indonesia.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambah fokus penelitian (variabel) yang tidak terdapat pada penelitian ini, yang terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah dan menambah objek penelitian misalnya 1 Provinsi atau membandingkan antar Kabupaten/Kota yang ada, bukan hanya berfokus pada 1 objek yang berskala kecil, serta menggunakan metode penelitian berbeda yang tentu lebih bisa menjawab serta memperoleh informasi lebih dalam dari responden agar data yang diperoleh lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2020). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandawangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang)
- Astiani, Y. (2017). Pengaruh Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Akuntansi, Pengetahuan Akuntansi, dan Skala Usaha terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Barchelino, R. (2016). Penilaian Persediaan Barang Dagangan Pada PT. Surya Wenang Indah Manado. *Jurnal EMBA*, 4(14), 837–846.
- Barchelino, R. (2016). Penilaian Persediaan Barang Dagangan Pada PT. Surya Wenang Indah Manado. *Jurnal EMBA*, 4(14), 837–846.
- Barus, I. N. E., Indrawaty, A., & Solihin, D. (2018). Implementasi SAK EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) pada UMKM Borneo Food Truck Samarinda Community. *Journal of Accounting and Business Management (RJABM)*, 2(2), 176–183. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Budianto, H., & Ferriswara, D. (2017). Penerapan Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang menurut SAK ETAP pada CV. TJIPTO PUTRA MANDIRI INDONESIA. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 20(2), 124–138.
- Ismadewi, N. K., Herawati, N. T., & Atmaja, A. T. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Temak Ayam Boiler (Study Kasus Pada Usaha I Wayan Sudiarsa Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan). *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Ismail, J. (2021). Analisis Dampak Covid 19 pada UMKM Provinsi Gorontalo. Penelitian Mandiri.
- Judianto, R., Ismunawan, & Rahman, A. N. (2018). Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SEK-EMKM) pada UKM Davin Decor Surakarta. *JAB*, 4(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Maghfirah, M., & BZ, F. S. (2016). Analisis perhitungan harga pokok produksi dengan penerapan metode full costing pada umkm kota banda aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 59–70.
- Mangopa, S., Tuli, H., & Mahmud, M. (2020). Analisis Penerapan SAK-EMKM Persediaan Pada Usaha Mikro & Kecil Sektor Ritel Barang Harian. *Jambura Accounting Review*, 1(1), 36–47.
- Muchid, A. (2012). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) (Kasus pada UD. Mebel Novel I di Banyuwangi). *Preparation of Financial Statements UMKM Financially Accounting*
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Munawaroh, S. (2019). Pengaruh Independensi dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Inspektorat Kabupaten Berau. *Jurnal of Economic, Management and Accounting*, 2(1), 27–35.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ningtiyas, J. D. A. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 2(1), 11–17.
- Putra, Y. M. (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Pada Umkm Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 201–217. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.004>
- Reeve, J. M., Warren, C. S., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., Soepriyanto, G., Jusuf, A. A., & Djakman, C. D. (2012). *Principles of Accounting-Indonesia Adaptation*. Jakarta: Salemba Empat.
- Reeve, M., Warren, C. S., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., Soepriyanto, G., Jusuf, A. A., & Djakman, C. D. (2012). *Principles of Accounting-Indonesia Adaptation*. Salemba Empat.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi: Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- SAK EMKM. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil, Mikro & Menengah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- SAK. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Tuli, H. (2019). Penerapan SAK EMKM tentang Persediaan pada Pelaku Usaha Mikro Sektor Kuliner di Lingkungan Kampus Universitas Negeri Gorontalo. *Penelitian Mandiri*.
- Wafi, I. (2019). Pengakuan Dan Pengukuran Serta Penyajian Persediaan Barang Dagangan Dengan Menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) Berdasarkan Sak Emkm Pada Toko Bangunan Berkat Berkawan Barabai.
- Ziukov, S. (2015). A literature review on models of inventory management under uncertainty. *Business Systems & Economics*, 5(1), 26. <https://doi.org/10.13165/vse-15-5-1-03>